

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu Lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa di era abad ke-21, adanya tuntutan untuk melaksanakan tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga non perbankan. Pemicu utamanya karena diakibatkan adanya krisis yang terjadi di sektor perbankan pada pertengahan tahun 1997 hingga 2000. Usaha mengembalikan kepercayaan pada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga Tindakan penting lain yaitu: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawasan Bank. Salah satu hal yang terpenting yang utama dilakukan adalah pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Munculnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak terhadap *corporate governance* yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa pentingnya *good corporate governance* belum diterapkan dengan baik. Laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi apabila perusahaan menerapkan *corporate governance* yang semakin baik, sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

Kasus manipulasi keuangan terjadi pada perusahaan Perbankan yaitu yang pertama pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Menurut informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari para pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar (www.finance.detik.com, 28 september 2019).

Selain itu terdapat kasus lain dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). SNP Finance merupakan anak usaha Grup Columbia, yang selama ini dikenal bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga. Pada Senin lalu, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menindaklanjuti laporan PT Bank Panin Tbk atas dugaan jaminan piutang fiktif SNP dan menetapkan lima pimpinan SNP sebagai tersangka. Laporan keuangan hasil audit dari akuntan publik itu yang kemudian dijadikan dasar bagi SNP untuk meraup kredit dari bank lain. Menurut data Bareskrim Polri, yang diperoleh dari dokumen pencairan kredit yang pernah diterima SNP, total penggelapan mencapai Rp 14 triliun. Namun OJK menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP Finance tidak mencapai Rp 14 triliun. Sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini hanya menyalurkan pendanaan sekitar Rp 2,2 triliun. Berdasarkan keterangan resmi di situs Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan telah melakukan analisis pokok permasalahan. Lembaga itu kemudian menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan para akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance selama tahun buku 2012-2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK memeriksa KAP dan dua akuntan publik yang dimaksud. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa akuntan

publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. (www.bisnis.tempo.co, 13 april 2020).

Fenomena ini jelas menunjukkan lemahnya integritas laporan keuangan yang disajikan perusahaan melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak internal sampai pihak eksternal. Terungkapnya ketidakjujuran perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya harga saham dari perusahaan yang terkena skandal secara drastis.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti termotivasi untuk menguji mekanisme GCG dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan karena adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. Peneliti bermaksud menguji kembali variabel independen yang pernah digunakan oleh Dewi dan Putra (2016), Indrasari *et al.*, (2016), Qoyyimah *et al.*, (2015), Alwijaya *et al.*, (2019), Istiantoro *et al.*, (2017). Variabel independen yang digunakan adalah mekanisme GCG yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, komisaris independen, komite audit serta ukuran perusahaan.

Menurut Mulyadi (2011) Integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Integritas laporan keuangan adalah salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam wujud penyediaan informasi (laporan keuangan) yang secara formal wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dapat dinilai dengan menggunakan prinsip konservatisme karena dari perspektif perilaku oportunistik

teori akuntansi positif, perusahaan yang mengalami kegagalan manajemen akan menutupi masalah kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan serta aktiva bersih, maka untuk menghindari manipulasi, praktik akuntansi konservatif dibutuhkan. Konservatisme yaitu tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak *overstated* dan kewajiban atau beban tidak *understate*.

Dalam mengatasi dan mencegah kasus kecurangan laporan keuangan terulang kembali, maka perlu ditingkatkan sebuah sistem pengelolaan perusahaan yang sering dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Sistem tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen atau pedoman bagi manajemen puncak atau *board* dalam mengelola perusahaan sesuai kaidah, norma, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* memiliki kemungkinan kecil atau bahkan tidak sama sekali untuk melakukan praktik kecurangan dan mengabaikan kepentingan pihak lain terutama pihak yang berasal dari luar perusahaan.

Agar laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang bermutu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* maka *corporate governance* perusahaan harus mempunyai struktur yang tertata dengan baik, salah satu struktur *corporate governance* yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring adalah peranan kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010) ada lima asas *good corporate governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Setiap perusahaan diharapkan mampu untuk memastikan penerapan asas GCG di setiap aspek bisnis serta di seluruh jajaran perusahaan.

Kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya. Keberadaan saham institusi akan mampu meningkatkan pengawasan kinerja manajemen. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016) serta Alwijaya et al., (2019) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Sedangkan menurut Qoyyimah *et al.*, (2015), Istiantoro *et al.*, (2017) kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan akan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja manajemen merupakan salah satu cara untuk memastikan penerapan asas *corporate governance*. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Istiantoro *et al.*, (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Qoyyimah *et al.*, (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Keberadaan pemegang saham institusional didukung dengan keberadaan komisaris independen. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 dijelaskan bahwa dewan komisaris minimal dua orang anggota, dimana salah satunya adalah komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dalam jajaran komisaris berfokus pada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham dari praktik curang. Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) (2010) menyebutkan komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Indrasari *et al.*, (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Sedangkan menurut Istiantoro *et al.*, (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif pada integritas laporan keuangan.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dewan komisaris harus membentuk komite audit. Hal ini bertujuan untuk membantu efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris terhadap manajemen perusahaan. Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris guna memastikan

laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian Istiantoro *et al.*, (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra (2016) serta Indrasari *et al.*, (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Ukuran Perusahaan juga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan, perusahaan besar cenderung mempunyai manajemen yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil. Hasil penelitian Fajar dan Nurbaiti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Siahaan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Perbankan ?. Masalah pokok tersebut dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI ?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak akademisi dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia, serta dapat dijadikan referensi sekaligus perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama.

2. Pihak Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku-perilaku kecurangan manajemen perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian secara global.

3. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit pengetahuan bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga manajemen perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang tidak menyesatkan pemakainya. Serta dapat memberikan wawasan tentang GCG yang mempengaruhi integritas laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam sistem tata kelola perusahaan.

4. Pemakai Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan, terutama investor dan kreditur karena dapat membantu memahami *corporate governance* yang mempengaruhi integritas laporan keuangan sehingga para pemakai laporan keuangan dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.